DIMENSI, VOL. 6, NO. 1: 63-76 JANUARI 2017

ISSN: 2085-9996

# STRATEGI PEMERINTAH KOTA BATAM DALAM IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBERANTASAN BUTA AKSARA DI DAERAH *HINTERLAND*

# BATAM GOVERNMENT STRATEGY ON IMPLEMENTATION OF ILLITERACY ERADICATION PROGRAM AT HINTERLAND AREA

Meri Enita Puspita Sari<sup>1</sup>, Yustinus Farid<sup>2</sup>, Diah Ayu Pratiwi<sup>3</sup>

1,2,3</sup>Prodi Ilmu Pemerintahan, FISIPOL,Universitas Riau Kepulauan Batam,
Indonesia.

<sup>1</sup>puspita.meri@yahoo.co.id, <sup>2</sup>ayik\_gladiator@yahoo.co.id, <sup>3</sup>diah\_mahdan@yahoo.co.id

#### Abstrak

Pemberantasan buta huruf merupakan bagian integral pengentasan masyarakat dari kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, dan ketidakberdayaan dalarn kerangka makro pengembangan kualitas sumber daya manusia Indonesia. Pemberantasan buta huruf menjadi sangat penting dan strategis, mengingat kondisi pendidikan penduduk Indonesia masih rendah. Penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, dengan tujuan untuk mengetahui pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara kemudian mengevaluasi pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara yang dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan Kota Batam. Pada penelitian ini penulis berusaha mengembangkan konsep dan menghimpun data. Data yang dikumpulkan pada penelitian kualitatif yaitu terutama berupa katakata, kalimat, atau gambar yang memiliki arti lebih daripada sekedar angka atau frekuensi. Penelitian ini menitikberatkan pada field research atau penelitian lapangan, namun juga tidak mengesampingkan pada studi kepustakaan atau library research terutama dalam menyusun landasan teori. Langkah-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam dalam pemberantasan buta aksara yakni; Langkah Persiapan meliputi; Sosialisasi, Pendataan calon warga belajar dan Pengajuan proposal, Langkah Pelaksanaan meliputi 3 tahapan: Tahap Pemberantasan (Tahap I), Tahap Pembinaan (Tahap II) dan Tahap Pelestarian (Tahap III), Langkah Monitoring dan Evaluasi, Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut. Adapun faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah Nilai Sosial, Motivasi penduduk, keaktifan Tutor, Sarana dan Prasarana Warga Belajar dan Evaluasi Produk (Product).

Kata Kunci: Strategi, Implementasi, Buta Aksara

#### Abstract

Literacy is an integral part of people from ignorance, poverty, backwardness, and powerlessness dalarn framework of macro human resource development in Indonesia. Literacy becomes a very important and strategic, considering the state of education of Indonesia's population is still low. This study author uses qualitative descriptive research, with the aim to determine the implementation of the program and then evaluate the Eradication of Illiteracy Eradication of Illiteracy implementation of the program implemented by the Department of Education Technical Implementation Unit of Batam. In this study the authors sought to develop concepts and collect data. Data collected in qualitative research is primarily in the form of words, phrases, or images that have more meaning than just a number or frequency. This study focused on field research or field research, but also did not rule out the literature study or library research, especially in developing a theoretical basis. Measures implemented technical implementation unit Batam City Department of Education in the eradication of illiteracy; Step Preparation includes; Socialization, Data Collection and Filing prospective learners proposals, Step Implementation includes 3 stages: Stage Eradication (Phase I), Development Phase (Phase II) and preservation phase

(phase III), Step Monitoring and Evaluation, Reporting and Follow-up step. The factors that affect the program Eradication of Illiteracy in Batam is Social Values, Motivation population, liveliness Tutor, Citizens Learning Infrastructure and Product Evaluation (Product).

Keywords: Strategy, Implementation, Illiteracy

## **PENDAHULUAN**

Pendidikan merupakan salah satu yang utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena dengan pendidikan masyarakat mampu mengembangkan potensi diri dan bersaing di dunia kerja, mendapatkan pendidikan merupakan hak semua orang. Pendidikan bisa dilaksanakan di lingkungan formal maupun informal, namun tidak semua orang bisa mendapatkan kesempatan yang sama untuk memperoleh pendidikan termasuk pendidikan dasar sekalipun sehingga banyak diantara masyarakat Indonesia masih buta huruf, tidak bisa menulis dan tidak mampu berhitung yang dikenal dengan buta aksara.

50 persen pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun keatas terutama perempuan pada tahun 2015 dan akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa maka target tersebut untuk Indonesia disesuaikan menjadi sebagai berikut "Minimal 50 persen buta aksara dapat dikurangi dan buta aksara usia 15-24 tahun terlayani tuntas pada tahun 2015, serta peningkatan 50 persen aksarawan baru terutama perempuan mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan" (Direktorat Pendidikan Masyarakat,

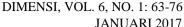
Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006).

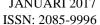
Di Indonesia, target keaksaraan fungsional adalah tercapainya peningkatan sebesar

Pemerintah juga menyatakan bahwa sasaran (*target audience*) tahun 2015. adalah penduduk dewasa usia 15 tahun ke atas, mengingat usia 7-15 tahun merupakan sasaran wajib belajar pendidikan dasar baik melalui jalur pendidikan formal SD dan MI atau bentuk lain yang sederajat serta SMP dan MTs atau bentuk lain yang sederajat dan/atau melalui jalur pendidikan nonformal dan informal sebagai pendidikan berkelanjutan (*continuing education*) yakni pendidikan lanjutan yang diselenggarakan bagi peserta didik yang telah menamatkan pendidikan dasar. Sesuai PPRI NO. 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar, dan PWB/PBA secara intensif kepada masyarakat secara menyeluruh (Pemerintah

Kota Batam Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Batam Tahun 2008).

Di Kota Batam, masih banyak terdapat masyarakat yang mengalami buta aksara terutama di daerah *hinterland* Kota Batam, masih banyaknya masyarakat yang mengalami buta aksara sehingga perlu pendataan ulang terhadap jumlah masyarakat yang mengalami buta aksara tersebut, dengan adanya data yang akurat dan strategi yang tepat dalam







penanganan akan membantu pemerintahan dalam pemberantasan buta aksara. Adapun data penduduk buta aksara tahun 2013 seperti pada table 1 dibawah ini

:

Tabel 1.Jumlah Buta Huruf / Buta Aksara Kota Batam ( 2010-2012 )

Tahun	Jumlah Penduduk	Tidak/Belum Pernah Sekolah	Jenjang	Buta Huruf	
		i eman sekolan	Umur		
2010	1,056,701	115,522	15-24	909	
2011	1,137,894	98,140	15-24	1057	
2012	1,198,232	99,453	15-24	705	

Sumber : DinasPendidikan Kota Batam 2013

Sejalan dengan itu, target keaksaraan fungsional di Indonesia adalah tercapainya peningkatan sebesar 50 persen pada tingkat keaksaraan orang dewasa yaitu kelompok usia 15 tahun keatas terutama perempuan pada tahun 2015 dan akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan bagi semua orang dewasa maka target tersebut untuk Indonesia disesuaikan menjadi sebagai berikut "Minimal 50 persen buta aksara dapat dikurangi dan buta aksara usia 15-24 tahun terlayani tuntas pada tahun 2015, serta peningkatan 50 persen aksarawan baru terutama perempuan mempunyai akses yang sama terhadap pendidikan dasar dan pendidikan berkelanjutan" (Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006). Buta aksara merupakan salah satu momok dan sekalaigus menjadikan posisi negara ini sebagai negara dengan tingkat Pembangunan Indeks Manusia yang selalu dalam posisi rendah dibandingkan dengan negara Vietnam yang baru merdeka sekalipun. Masih besarnya angka buta aksara yang terdapat pada masyarakat suatu darah adalah gambaran betapa pendidikan di daerah itu tingkat partisipasi pendidikan masyarakatnya masih rendah. Implikasi dan konsekuensi yang harus ditanggung karena banyaknya jumlah penduduk yang buta aksara dan anak-anak yang rentan buta aksara kembali karena putus sekolah (terutama pada kelas rendah) adalah rendahnya tingkat komparasi dan daya saing pada berbagai jenis pekerjaan pada berbagai sektor dan akan memberikan sumbangan meningkatnya angka pengangguran. Kemiskinan, kebodohan, ketertinggalan dan keterasingan sosial juga salah satunya disebabkan oleh buta aksara. Untuk itu, upaya pemberantasan buta aksara harus segera dilakukan dengan terencana dan sistematis serta dapat dituntaskan agar tidak berakibat buruk bagi perkembangan pembangunan SDM di Kota Batam.

Data tentang penduduk buta aksara di Kota Batam tersebut dapat meningkat pada tahun 2014 dan 2015 apabila tidak dilakukan pendataan ulang dan penanganan secepatnya. Pemerintah khususnya Dinas Pendidikan Kota Batam harus memiliki strategi khusus dalam pengimplemetasian program pemberantasan buta aksara demi kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang yang sudah disampaikan sebelumnya, sehingga rumusan masalahnya adalah :

- 1. Bagaimana strategi yang dilakukan pemerintah Kota Batam dalam implementasi program Pemberantasan Buta Aksara di daerah *Hinterland* Kota Batam ?
- 2. Apakah faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi program pemberantasan buta aksara di daerah *Hinterlend* Kota Batam ?

#### Kerangka Teori

Dalam penelitian ini, menggunakan teori implementasi kebijakan sebagai grand teori dan teori mengenai pemerintah daerah serta buta aksara. Yang dimaksud pemrintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan yang dimaksud buta aksara adalah ketidakmampuan seseorang untuk membaca dan menulis. Sehingga Tingkat melek aksara (*literacy*) merupakan salah satu parameter yang paling mempengaruhi perkembangan kehidupan manusia (*Human Development Index*), menentukan tingkat kesejahteraan (*product domestic bruto*) sekaligus menentukan tingkat umur harapan hidup (*life expectancy*). Jadi jika penduduk makin melek aksara, berarti makin majulah masyarakat itu dalam peradabannya ke depan.

Dalam penelitian ini, teori implementasi mengutip pendapat G. Shabbir Cheema dan Dennis A. Rondinelli mengemukakan bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan program-program pemerintah yang bersifat desentralistis. Faktor-faktor tersebut diantaranya:

## a. Kondisi lingkungan

Lingkungan sangat mempengaruhi implementasi kebijakan, yang dimaksud lingkungan ini mencakup lingkungan *sosio cultural* serta keterlibatan penerima program.

#### b. Hubungan antar organisasi

DIMENSI, VOL. 6, NO. 1: 63-76 JANUARI 2017

ISSN: 2085-9996

Dalam banyak program, implementasi sebuah program perlu dukungan dan koordinasi dengan instansi lain. Untuk itu diperlukan koordinasi dan kerjasama antar instansi bagi keberhasilan suatu program.

## c. Sumberdaya organisasi untuk implementasi program

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources).

## d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Yang dimaksud karakteristik dan kemampuan agen pelaksana adalah mencakup struktur birokrasi, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi dalam birokrasi, yang semuanya itu akan mempengaruhi implementasi suatu program (Triwibowo, 2009).

Berdasarkan faktor-faktor diatas, yaitu kondisi lingkungan, hubungan antar organisasi, sumberdaya organisasi untuk implementasi program, karakteristik dan kemampuan agen pelaksana merupakan hal penting dalam mempengaruhi suatu implementasi program, faktor-faktor tersebut akan menghasilkan kinerja dan dampak suatu program yaitu sejauh mana suatu program dapat mencapai sasaran yang telah ditetapkan, mengetahui bagaimana perubahan kemampuan administratif pada organisasi lokal, serta berbagai keluaran dan hasil yang lain.

Program adalah rencana yang telah diolah dengan memperhatikan faktor- faktor kemampuan ruang waktu dan urutan penyelenggaraannya secara tegasdan teratur sehingga menjawab pertanyaan tentang siapa, dimana, sejauhmana dan bagaimana. Program juga merupakan tahap-tahapdalam penyelesaian yang berisi langkah-langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mengimplementasikan suatu program atau kebijakan ada 3 kegiatan yaitu:

- a. Organisasi adalah pembentukan atau penataan kembali sumberdaya, unit-unit serta metode untuk menjadikan program berjalan.
- b. Interpretasi adalah menafsirkan agar program menjadirencana dan pengarahan yang tepat dan dapat diterima serta dilaksanakan
- c. Penerapan adalah ketentuan rutin dari pelayanan pembayaran atau yang lainnya yang disesuaikan dengan tujuan atau perlengkapan dari program.

(Triwibowo, 2009).

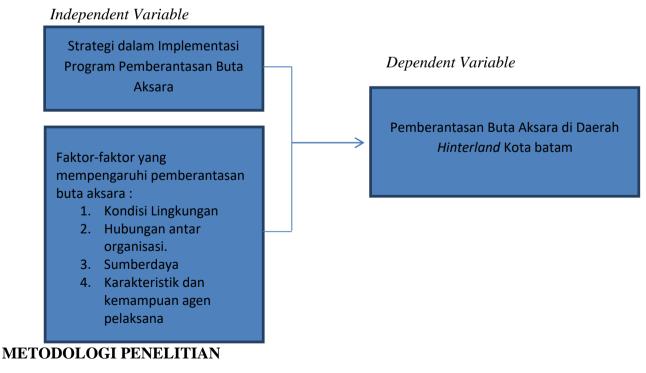
Berdasarkan penjelasan dan pengertian implementasi maka dapat ditarik kesimpulan bahwa awalnya program merupakan sesuatu yang harus ada demi tercapainya

kegiatan implementasi. Selanjutnya adanya kelompok yang menjadi sasaran program sehingga kelompok menjadi ikut dilibatkan dan membawa hasil dari program yang dijalankan dan adanya program dan peningkatan dalam kehidupannya. Program akan menunjang implementasi, karena dalam program tersebut telah dimuat berbagai aspek yaitu :

- a. Adanya tujuan yang ingin dicapai.
- b. Adanya kebijaksanaan-kebijaksanaan yang diambil dalam mencapai tujuan.
- c. Adanya aturan-aturan yang harus dipegang dan prosedur yang harus dinilai
- d. Adanya strategi dalam pelaksanaan.

Dalam prakteknya implementasi program sering mendapatkan masalah-masalah baru yaitu umumnya disebabkan kesenjangan-kesenjangan antara waktu penetapan atau kebijaksanaan dengan pelaksanaannya. Sehingga organisasi yang mengoperasionalkan implementasi program memiliki kemampuan yang tinggi dalam menjalankannya. Organisasi yang mengoperasionalkan implementasi program harus memiliki hirarki dalam kepengurusannya. Jadi program dapat dikatakan sebagai kebijaksanaan yang telah disepakati dan dikomunikasikan untuk dilaksanakan dari atas hingga ke bawah.

Berdasarkan tinjauan teoritis dan definisi Konseptual, terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan penyelenggara pelayanan publik dalam menyelenggarakan pelayanan publik. Sehingga kerangka berpikirnnya adalah :



1) Waktu dan Tempat Penelitian

DIMENSI, VOL. 6, NO. 1: 63-76

JANUARI 2017 ISSN: 2085-9996



Pelaksanaan Penelitian ini dari bulan April- November 2016. Penelitian ini bertempat di Dinas Pendidikan Pemerintah Kota Batam.

#### 2) Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian deskriftif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Dengan penelitian ini diharapkan peneliti mengetahui strategi dan faktorfaktor yang mempengaruhi implementasi program pemberantasan buta aksara di daerah *hinterland* Kota Batam. Dalam kajian ini akan diketahui hambatan/kendala terhadap implementasi program pemberantasan buta aksara di Kota Batam.

## 3) Proses Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan dalam rangka mencapai tujuan penelitian. Data dikumpulkan dari sampel yang telah ditentukan sebelumnya. Sampel tersebut terdiri atas sekumpulan unit analisis sebagai sasaran penelitian. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan tehnik snowball sampling, tehnik ini digunakan untuk memperoleh informan dalam organisasi atau kelompok yang terbatas untuk menemukan informan yang tepat.

#### 4) Tehnik Pengumpulan Data

Tehnik yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

- a. Observasi atau pengamatan adalah aktivitas pencatatan fenomena yang dilakukan secara sistematis.
- b. Wawancara, metode ini digunakan dengan pedoman wawancara.
- c. Dukumentasi, metode ini digunakan untuk menelusuri data historis.

#### 5) Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan tehnik analisa yaitu:

- a. *Data Reduction* (Reduksi Data) yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis dari lapangan.
- b. *Data Display* (Penyajian Data) yaitu sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.
- c. *Conclusion Drawing/ verification* (Penarikan Kesimpulan / verifikasi yaitu penarikan arti data yang telah ditampilkan.

# Strategi Pemerintah Kota Batam Dalam Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Daerah *Hinterland*

Dalam rangka pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara ini, perlu dilakukan beberapa langkah agar dicapai pelaksanaan yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penyelenggara. Pemberantasan Buta Aksara dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas Pendidikan. Langkah-langkah yang diterapkan unit pelaksana teknis Dinas Pendidikan Kota Batam tersebut adalah sebagai berikut Data

Dinas Pendidikan 2013

## 1) Langkah Persiapan

Langkah persiapan dalam program Pemberantasan Buta Aksara meliputi hal-hal sebagai berikut:

#### a. Sosialisasi

Sosialisasi program Pemberantasan Buta Aksara yang dilakukan oleh Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal di Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kota Batam. Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal mensosialisasikan tentang program Pemberantasan Buta Aksara pada perangkat Desa dan Tokoh masyarakat setempat untuk dipublikasikan kepada masyarakatnya.

Tabel 2 Data Pendidikan Formal Tahun 2013

SEDERAJA	AT SEDI			_	IAI- D	D IV/ S I Jumlah					
_		L	P	L	P	P L	P	L	P	L	P
	Galang	698	566	5 719	719	61	63	50	32	3	-

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

## b. Pendataan calon warga belajar

Pendataan merupakan kewenangan masing-masing desa yang bisa dilakukan oleh Kepala Desanya langsung atau Kepala Desa menunjuk tokoh-tokoh masyarakat setempat seperti PKK, atau pihak-pihak yang memahami karakteristik desanya untuk melakukan pendataan secara langsung. Data yang

JANUARI 2017 ISSN: 2085-9996



diperoleh digunakan sebagai data dasar desa mana saja yang perlu diselenggarakan program Pemberantasan Buta Aksara.

Tabel 3. Pendataan Calon Warga Belajar Tahun 2013

No	Organisasi	Jumlah%	Jumlah Warga
1.	PKK	48,67%	73
2.	Kepala Desa	34,66%	52
3.	PKBM	16,67%	25
	Jumlah	100%	150

Sumber: Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

# c. Pengajuan proposal

Penyelenggara Pemberantasan Buta Aksara menyusun dan mengajukan proposal penyelenggaraan program Pemberantasan Buta Aksara kepada Dinas Pendidikan Kota Batam.

Tabel 4. Penduduk Buta Aksara Berumur 5 Tahun Keatas Tahun 2013

D 1 1 1 1	Penduduk Buta Aksara		Persentase Penduduk Buta				
Penduduk I			Aksara		Total		
Laki-laki	Perempuan		Laki-Laki	Perempuan			
827	971	1,798	11.36	15.93	13.44		

Sumber: DinasPendidikan Kota Batam 2013

#### 2) Langkah Pelaksanaan

Pelaksanaan proses pembelajaran meliputi 3 tahapan:

#### a) Tahap Pemberantasan (Tahap I)

Pada tahap Pemberantasan ini, materi yang diberikan adalah materi dasar membaca, menulis dan berhitung. Tutor memberikan materi awal dengan mengenalkan huruf abjad kemudian membantu warga belajarnya untuk dapat menghafal huruf-huruf. Setelah warga belajar mampu mengenal dan menghafal huruf-huruf abjad, kemudian tutor mengajari para warga belajar untuk berlatih mengeja suku kata. Jika hal itu sudah bisa dilakukan oleh warga belajar dengan benar, maka tutor akan menambah tingkat kesulitan dalam proses pembelajaran tahap I ini, yaitu dengan mengajari warga belajar mengeja dan berlatih membaca kata sederhana. Untuk materi berhitung ditahap I ini, tutor memberi materi dengan menggunakan angka-angka yang sangat sederhana.

Tabel 5. Pelaksana dan Materi Tahun 2013

Pelaksana	Materi
	a) Mengenalkan Huruf
PKBM	b) Mengeja
	c) Belajar Tutor Sebaya

Sumber Data Dinas Pendidikan Kota Batam 2013

#### b) Tahap Pembinaan (Tahap II)

Setelah melalui tahap I, maka pada tahap II ini warga belajar akan diberi materi pembelajaran yang tingkatannya lebih sulit. Awalnya tutor akan mengulang kembali materi dasar yang telah diberikan pada tahap I. Selanjutnya, tutor mengajarkan kepada warga belajar untuk membaca kalimat sederhana.

#### c) Tahap Pelestarian (Tahap III)

Pada tahap III ini warga belajar diajarkan menggunakan kalimat-kalimat yang lebih komplek, misalnya membaca dan menulis paragraf sederhana. Sedangkan untuk materi berhitung, tutor telah mengajarkan cara pengoperasian perkalian dan pembagian.

## 3) Langkah Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan dan evaluasi reguler dilakukan untuk mengetahui perkembangan kelompok belajar dan masalah yang dihadapi dalam proses pembelajaran. Dengan pemantauan reguler maka kegiatan pembelajaran dapat terkendali. Monitoring dan evaluasi merupakan upaya pengendalian dan pembinaan yang terus menerus sejak tahap persiapan, pelaksanaan, dan tindak lanjut, maka dalam proses monitoring dan evaluasi perlu dilakukan dari waktu ke waktu yang menyangkut keadaan warga belajar, sarana belajar, proses dan isi materi belajar. Kegiatan monitoring dan evaluasi perlu dilaksanakan secara rutin dan teratur, sehingga setiap masalah dan hambatan yang ditemui dalam pembinaan dan pelaksanaan program di lapangan dapat segera dicarikan jalan pemecahannya atau diberikan masukan dalam rangka perbaikan program.

Evaluasi dilaksanakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan kelompok belajar dalam menambah pengetahuan masyarakat tentang keaksaraan. Yang terlibat saat evaluasi terutama adalah tutor dibantu dari tim Kecamatan yang langsung terjun mengevaluasi kelompok belajar. Pelaksanaan evaluasi melibatkan tutor. Bentuk evaluasinya adalah para warga belajar diberi soal yang telah disesuaikan dengan kurikulum dari Dinas Pendidikan Kabupaten kemudian dikerjakan dan diberi

ISSN: 2085-9996



skor sesuai dengan benar dan salahnya. Materi ujian yang diberikan adalah sesuai dengan materi pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara yang berisi materi membaca, menulis, dan berhitung serta tentang keterampilan fungsionalnya.

## 4) Langkah Pelaporan dan Tindak Lanjut

Kegiatan pelaporan dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelompok belajar sampai dengan tingkat pusat. Pihak penyelenggara dan tutor memberikan laporannya pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam secara berkala. Dalam kegiatan pelaporan ini tutor ataupun penyelenggara wajib memberikan laporan yang sebenarnya tentang bagaimana keadaan kelompok belajar yang ditanganinya agar apabila ada masalah dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Untuk Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Pendidikan Kota Batam memberikan laporannya kepada Dinas Pendidikan Provinsi.

Hal-hal yang dilaporkan menyangkut:

- a) Proses belajar mengajar
- b) Perkembangan dan kemajuan warga belajar
- c) Kegiatan dan hasil belajar
- d) Hambatan selama proses pembelajaran

Dalam proses pembelajaran masih ketidak mampuan warga belajar dalam mengikuti proses pembelajaran, sehingga secara kualitas masih ada yang belum optimal dalam menguasai materi pembelajaran.

Tindak lanjut yang dilakukan oleh penyelenggara adalah melakukan pelaporan ke Dinas kota dan dilanjutkan ke provinsi. Dengan demikian diadakannya Program Jaring Garap. Program ini mengevaluasi jumlah buta aksara di Kota Bata. Hal ini bertujuan untuk membelajarkan kembali para warga belajar yang belum benar-benar mampu menguasai materi pembelajaran.

# Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Implementasi Program Pemberantasan Buta Aksara Di Kota Batam

Program pemberantasan buta aksara merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberantas masyarakat yang buta aksara dengan mengembangkan kemampuan mereka dalam menguasai dan menggunakan keterampilan membaca, menulis dan berhitung, kemampuan mengamati dan menganalisa yang berorentasi pada kehidupan sehari-hari dengan memanfaatkan potensi yang ada dilingkungan sekitarnya.

Keberhasilan program Buta Aksara diperhitungkan berdasarkan peningkatan kemampuan keaksaraan yang dimiliki warga belajar. Selain itu juga diharapkan warga mampu menerapkan kemampuan keaksaraannya secara fungsional dalam kehidupan seharihari. Terdapat faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan keaksaraan.

Faktor yang mempengaruhi program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam adalah sebagai berikut:

## a. Kondisi Lingkungan

Dalam implementasi kebijakan, kondisi lingkungan sangat mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan program karena seideal apapun program apabila tidak didukung oleh lingkungan yang menjadi sasaran program maka program tersebut tidak akan berjalan. Kondisi lingkungan ini bisa dilihat dari segi sosial budaya dam keterlibatan penerima program, berdasarkan hasil penelitian, program pemberantasan buta aksara belum berjalan secara optimal, masyarakat banyak yang belum mau menginformasikan bahwa ada diantara diri masyarakat yang buta aksara. Di samping itu, masyarakat juga belum banyak memahami bahwa pendidikan itu sangatlah penting.

## b. Hubungan Antar Organisasi

Keberhasilan implementasi program dapat tercapai apabila mendapat dukungan dan koordinasi yang berjalan dengan baik dengan organisasi dan instansi lain, berdasarkan hasil penelitan faktor hubungan antar organisasi sudah berjalan baik dimana Dinas Pendidikan melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas Pendidikan sudah bekerja sama dengan Kecamatan dan kelurahan baik untuk pendataan warga yang buta aksara ataupun saat pelaksaaan program.

## c. Sumberdaya

Implementasi kebijakan perlu didukung sumberdaya baik sumberdaya manusia (human resources) maupun sumberdaya non-manusia (non human resources). Dalam penelitian ini, sumberdaya yang dimaksud adalah Tutor, dimana tutor memegang peranan penting dalam pelaksanaan program Pemberantasan Buta Aksara di Kota Batam karena tanpa dukungan tutor maka kegiatan pembelajaran tidak akan berjalan sesuai yang diinginkan. Sejauh ini kinerja tutor pada kelompok belajar di Kota Batam cukup memuaskan dilihat dari keuletan dan kesabaran tutor dalam menghadapi warga belajar baca tulis. Sedangkan sumberdaya non-manusia misalnya sarana dan prasarana sudah memadai karena kegiatan pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara ini sudah mendapat dukungan dari Pemerintah



yang berupa penyediaan sarana dan prasarana bagi warga belajar sehingga para warga belajar tidak dituntut untuk membayar sedikitpun. Sarana dan prasarana tersebut sangat standar berupa alat tulis-menulis, namun sudah bisa mendukung berjalannya proses pembelajaran program Pemberantasan Buta Aksara.

d. Karakteristik dan kemampuan agen pelaksana

Program pemberantasan buta aksara di daerah Hinterland sudah berjalan cukup bagus, dari hasil penelitian agen-agen pelaksana kebijakan sudah menjalani program sesuai dengan tahapan-tahapan dan strategi yang sudah direncanakan.

#### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Kesimpulan dari penelitian ini yaitu bahwa strategi yang dilaksanakan oleh Dinas pendidikan Kota Batam dalam implementasi pemberantasan Buta Aksara sudah berjalan sesuai dengan program yang direncanakan hanya satu faktor saja yang cukup menghambat dalam pelaksanaan program yaitu faktor kondisi lingkungan namun berdasarkan hasil penelitian hal tersebut dapat diatasi dengan pola hubuangan antar organisasi dan kemampuan agen pelaksana dalam merangkul dengan baik seluruh elemen yang terlibat dalam program pemberantasan buta aksara.

Adapun saran dalam penelitian implementasi pemberantasan Buta Aksara adalah sebagai berikut :

- 1) Pemerintah Kota Batam Khususnya Dinas Pendidikan lebih meningkatkan sosialisasi tentang program pemberantasan Buta Aksara dan pentingnya pendidikan.
- 2) Warga harus pro-aktif dalam program Pemberantasan Buta Aksara yang telah diselenggaran Dinas Pendidikan Kota Batam.

#### REFERENSI

Direktorat Pendidikan Masyarakat, Dirjen Pendidikan Luar Sekolah, Departemen Pendidikan Nasional. 2006. *Pedoman Pelaksanaan: Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara*. Jakarta.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Sosial. Erlangga. Jakarta.

Kusnadi, M.Pd dkk, 2005. Pendidikan Keaksaraan Filisofi, Strategi, Implementasi. Departemen Pendidikan Nasional direktorat Pendidikan Luar Sekolah Direktorat Pendidikan Masyarakat. Jakarta.

Nasution, Ade Parlaungan. (2017). *Potret Kehidupan Masyarakat Hinterland Kota Batam*, UNRIKAPress, Batam

- Triwibowo, Darmawan dan Nur Iman Subono (ed), 2009, Meretas Arah Kebijakan Sosial Baru di Indonesia; Lebih dari Sekedar Pengurangan Kemiskinan. LP3ES. Jakarta
- Winarno, Budi. 2002, "Apakah Kebijakan Publik?" dalam Teori dan Proses Kebijakan Publik. Media Pressindo. Jakarta.
- http://file.upi.edu/Direktori/FIP/JUR.\_KURIKULUM\_DAN\_TEK.\_PENDIDIKAN/1956 04041984031DIDI\_SUPRIADIE/RADPUS.pdf Permendiknas 35 Tahun 2006, (Pemerintah Kota Batam Rencana Aksi Daerah Pendidikan Untuk Semua (PUS) Kota Batam Tahun 2008)